

Jurnal Ilmu Sosial **Mamangan**

Seni Tradisi di Pasaman; Yang Hilang dan Yang Bertahan

Noni Sukmawati & Zaiyardam Zubir

Penanaman Nilai Dalam Pembelajaran Pkn Melalui Inovasi Pendekatan Value Clarification Technique (VCT) Di Sekolah

Sudirman

Peran LSM Dalam Resolusi Konflik Tapal Batas Antara Nagari Sumpur Dengan Nagari Bungo Tanjung, Kabupaten Tanah Datar

Sri Rahmadani

Strategi Organisasi Formal Menjaga Ketahanan Institusi Lokal Di Pasar Raya Padang

Marleni

Masyarakat *Powerless* Dan Derita Kerusakan Lingkungan

Dian Kurnia Anggreta

Konflik Tanah Ulayat Antara Kaum Caniago Di Nagari Kasang Dengan Badan Pertanahan Nasional Padang Pariman

Rinel Fitlayeni



Jurnal Ilmu Sosial
Mamangnan

Nomor 2, Volume 2
Juli-Desember 2015

ISSN :
2301-8496

Program Studi Pendidikan Sosiologi,
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumbar



Jurnal Ilmu Sosial Mamangan

Volume 2, Nomor 2, Juli-Desembar2015

Mitra Bestari

Prof. Dr. Afrizal, MA. (FISIP, Unand Padang)
Prof. Dr. Badaruddin, M. Si. (FISIP, USU Medan)
Dr. A. Latief Wiyata, M. Si. (Universitas Jember, Jember)
Dr. Fikarwin Zuska, M. Si. (FISIP, USU Medan)
Nurus Shalihin, M. Si., Ph.D. (Fak. Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang)
Dr. Semiarto A. Purwanto, M. Si. (FISIP, UI Jakarta)
Dr. Wahyu Wibowo, M. Si. (Universitas Nasional, Jakarta)

Dewan Redaksi

Dr. Zusmelia, M. Si.
Dr. Maihasni, M. Si.
Firdaus, S. Sos., M. Si.

Pemimpin Redaksi/Editor

Firdaus, S. Sos., M. Si.

Anggota Redaksi

Ariesta, M. Si.
Dian Kurnia Anggreta, S. Sos., M. Si.
Faishal Yasin, S. Sos., M. Pd.
Ikhsan Muharma Putra, M. Si.
Rio Tutri, M. Si.
Sri Rahayu, M. Pd.
Yuhelna, MA.

ISSN: 2301-8496

viii + 109 halaman, 21 x 29 cm

Alamat Redaksi:

Laboratorium Program Studi Pendidikan Sosiologi, STKIP PGRI Sumbar
Kampus STKIP PGRI, Jl. Gunung Pangilun, Padang, Sumatera Barat
Email: redaksimamangan@gmail.com & daus_gila@yahoo.com

Penerbit:

Laboratorium Program Studi Pendidikan Sosiologi, STKIP PGRI Sumbar

DAFTAR ISI

Seni Tradisi di Pasaman; Yang Hilang dan Yang Bertahan <i>Noni Sukmawati & Zaiyardam Zubir</i>	105-114
Penanaman Nilai Dalam Pembelajaran Pkn Melalui Inovasi Pendekatan Value Clarification Technique (VCT) Di Sekolah <i>Sudirman</i>	115-123
Peran LSM Dalam Resolusi Konflik Tapal Batas Antara Nagari Sumpur Dengan Nagari Bungo Tanjung, Kabupaten Tanah Datar <i>Sri Rahmadani</i>	123-134
Strategi Organisasi Formal Menjaga Ketahanan Institusi Lokal Di Pasar Raya Padang <i>Marleni</i>	135-143
Masyarakat <i>Powerless</i> Dan Derita Kerusakan Lingkungan <i>Dian Kurnia Anggreta</i>	144-150
Konflik Tanah Ulayat Antara Kaum Caniago Di Nagari Kasang Dengan Badan Pertanahan Nasional Padang Pariman <i>Rinel Fitlayeni</i>	151-157

MASYARAKAT *POWERLESS* DAN DERITA KERUSAKAN LINGKUNGAN

Dian Kurnia Anggreta

anggreta14@gmail.com

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat

ABSTRACT

Environmental damage is one of the phenomenon described in the Neo-Malthusian perspective, due to the increasing population. If not addressed, is predicted to further exacerbate the damage. Basically environmental damage it's not only because of increasing the population, but the exploitation and exploration activities, making capital accumulation that have a stake big enough. Environmental damage would occur relatively quickly. This article discusses the topic of conflict society between the company, due to environmental degradation that often occur, such as air pollution, soil and water, as a result of capital accumulation activities of industrial enterprises, plantation and mines. Quite often the people who are in a position to share the anguish powerless, even evicted from her own place. The method used literature, which examines issues of environmental damage is felt by the public.

Keywords: *Powerless Society, Environmental Damage, Conflict,*

ABSTRAK

Kerusakan lingkungan merupakan salah satu fenomena yang dijelaskan dalam aliran Neo-Malthusian, disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk. Jika tidak segera diatasi, diprediksi semakin memperburuk kerusakan tersebut. Pada dasarnya bukan hanya peningkatan jumlah penduduk saja yang menjadi penyebab kerusakan lingkungan, namun kegiatan eksploitasi dan ekprolasi dengan tujuan akumulasi kapital yang memiliki andil cukup besar. Dan kerusakan lingkungan tersebut terjadi dalam waktu relatif cepat. Tulisan ini menguraikan konflik masyarakat dengan perusahaan akibat kerusakan lingkungan yang kerap terjadi, seperti pencemaran udara, tanah dan air, akibat dari aktifitas akumulasi kapital perusahaan industri, perkebunan dan tambang. Tak jarang masyarakat yang berada pada posisi *powerless* turut menanggung derita, bahkan terusir dari tempat tinggal sendiri. Metode yang digunakan studi literatur, yang mengupas berbagai persoalan kerusakan lingkungan yang dirasakan masyarakat.

Kata Kunci: *Masyarakat Powerless, Kerusakan Lingkungan, Konflik,*

PENDAHULUAN

Seluruh aktifitas masyarakat manusia bergantung pada sumberdaya alam. Pemanfaatan sumberdaya alam sesuai dengan kebutuhan masyarakat, akan

memiliki kemampuan meregenerasi dengan sendirinya. Namun ketika terjadi penggunaan sumber daya alam tidak memperhatikan daya dukung lingkungan, akibatnya lingkungan rusak dan

dimungkinkan tidak terselamatkan. Ditambah dengan meningkatnya populasi manusia yang diikuti meningkatnya konsumsi atas sumberdaya alam, maka pemenuhan akan konsumsi itu dipenuhi seiring dengan berkembangnya industrialisme, konsumerisme, modernisasi dan perkembangan teknologi (Susilo 2009). Meadow dalam Mantra memprediksi persediaan sumberdaya alam akan habis pada tahun 2100. Itu semua akan terjadi jika pertumbuhan penduduk meningkat, kebutuhan akan bahan makanan meningkat, produk industri berbahan baku berasal dari sumberdaya alam meningkat, sedangkan ketersediaan sumber daya alam menurun (Mantra 2000). Jika tidak cepat diatasi, prediksi Meadow bisa terjadi. Namun sebelum itu semua, fenomena yang tampak nyata dari aktifitas meningkatnya kebutuhan akan sumberdaya alam adalah kerusakan lingkungan.

Kerusakan lingkungan akibat penggunaan sumberdaya alam yang berlebihan, mengakibatkan rusaknya lingkungan air (berbentuk pencemaran di sungai-sungai dan menurunnya kadar air di muka bumi sebagai akibat terlalu sering dieksploitasi), terjadinya polusi dan pencemaran udara, kerusakan tanah seperti lahan kritis akibat penggundulan hutan yang tidak memperhatikan aturan (*illegal logging*) dan rusaknya kadar produktif tanah sebab dieksploitasi secara terus-menerus (Susilo 2009). Kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh aktifitas rumah tangga masyarakat dan aktifitas produksi perusahaan industri, perkebunan dan tambang. Tulisan ini menyoroti kerusakan lingkungan akibat aktifitas produksi perusahaan industri, perkebunan dan tambang, karena realitasnya aktifitas perusahaan tersebut kerap menimbulkan kerusakan lingkungan, yang dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat.

Akifitas produksi perusahaan industri, perkebunan dan tambang pada satu sisi menguntungkan. Pada level makro pertumbuhan ekonomi meningkat dapat dilihat dari produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat (Sastri, Aimon, and Syofyan 2013). Peningkatan pada produksi perusahaan industri, perkebunan dan tambang menjadi indikator penting pertumbuhan ekonomi. Hal ini akan

berpengaruh pengukuran Produk Domestik Bruto (PDB) yang mempertimbangkan pendapatan dan pengeluaran selama periode tertentu. Untuk perusahaan sendiri aktifitas produksi mendatangkan keuntungan bagi pemilik modal. Pada sisi lain aktifitas produksi perusahaan tersebut menghasilkan limbah yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

Berbagai kerusakan lingkungan terjadi akibat aktifitas produksi perusahaan industri, perkebunan dan tambang. Seperti pencemaran udara yang kerap terjadi di Indonesia, bahkan sempat "dicicipi" oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Kerusakan lingkungan ini karena aktifitas pembukaan lahan perkebunan, yang terparah dan terpanjang terjadi tahun 2015. Pencemaran air dan tanah dari aktifitas perusahaan industri, yang kurang memperhatikan lingkungan. Aktifitas pertambangan yang juga merusak lingkungan. Kerusakan lingkungan tersebut kerap menepatkan masyarakat pada posisi dirugikan. Namun tidak sedikit masyarakat menyuarkan kerugian yang mereka alami akibat kerusakan lingkungan. Hal ini disebut sebagai konflik masyarakat dengan perusahaan. Sehingga diperlukan diulas konflik masyarakat dengan perusahaan akibat kerusakan lingkungan.

KONFLIK DALAM PERPEKTIF SOSIOLOGI

Sebelum mengulas konflik antara masyarakat dengan perusahaan terkait persoalan kerusakan lingkungan, terlebih dahulu dibahas maksud konflik dalam tulisan ini. Konflik secara harfiah dapat didefinisikan sebagai percekocokan, perselisihan dan pertentangan. *Pruitt & Rubin* mendefinisikan konflik sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan (*Pruitt and Jeffrey 2004*). Konflik menurut *Karl Marx* merupakan pertentangan kepentingan antara dua kelas (*Ritzer and Douglas 2004*). Walaupun dalam tulisannya *Marx* tidak mendefinisikan konflik secara jelas, namun pertentangan antar kelas ini terjadi antara kelas sosial *bourjuis* dan *proletar*. Kelas *Bourjuis* terdiri dari kapitalis modern yang memiliki sarana produksi. Sedangkan proletar merupakan kelas yang

terdiri dari pekerja yang tidak memiliki sarana produksi dan menyediakan tenaga kepada kapitalis untuk mempertahankan hidupnya. Mengutip pendapat Dahrendorf tentang konflik, merupakan pertentangan kepentingan yang terjadi antara dua pihak, yaitu pihak pemegang otoritas dan pihak yang tidak punya otoritas (Susan 2010). Konflik yang dimaksud dalam tulisan ini sependapat dengan ketiga ahli tersebut yang menyatakan konflik merupakan pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat konflik.

Konflik dalam ranah kajian sosiologi memusatkan perhatian pada struktur yang berskala luas, seperti konflik terjadi antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan perusahaan dan masyarakat dengan pemerintah. Namun konflik yang memusatkan perhatian pada level individu, merupakan ranah kajian Psikologi (Ritzer and Douglas 2004). Konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan menempatkan masyarakat sebagai pihak yang tidak memiliki otoritas dalam tulisan ini disebut *powerless*, dengan perusahaan yang memiliki otoritas (memiliki kekuasaan).

Konflik akibat kerusakan lingkungan dapat dinyatakan sebagai pertentangan kepentingan yang terjadi disebabkan oleh kerusakan lingkungan. seperti:

- a. Kerusakan air (kekeringan, pencemaran air)
- b. Polusi udara (pencemaran udara)
- c. Bencana yang terjadi akibat eksploitasi dan eksplorasi tanah

Penelitian seputar persoalan lingkungan pernah ditulis oleh Darsono dengan judul *Koalisi Ornop Pasca Orde Baru; Studi tentang Jaringan Walhi dalam Kampanye Isu Hutan*. Dalam tulisan tersebut diulas gambaran jaringan sosial Walhi sebagai NGO yang konsen terhadap isu-isu lingkungan, dalam melakukan koalisi untuk kampanye isu hutan. Disini Walhi bekerjasama dengan beberapa ornop seperti Telapak, ICEL, HuMa, serta ornop-ornop lokal dalam melakukan kegiatan kampanye stop konversi hutan, illegal logging, dan sebagainya (Darsono 2011). Tentu kegiatan yang dilakukan walhi dan berbagai ornop sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan. Namun tulisan ini fokus membahas jaringan sosial dan potensi

konflik ornop dalam kegiatan kampanye isu hutan.

Tulisan yang membahas persoalan kerusakan lingkungan ditulis oleh Mudhoffir, yang berjudul *Krisis Ekologi dan Ancaman bagi Kapitalisme*. Tulisan tersebut mengupas Buku *Living in the End Times* oleh Slavoj Zizek. Tulisan ini menjelaskan kerusakan lingkungan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat, karena ketergantungan terhadap alam. Kerusakan lingkungan dianggap ulah kapitalisme. Namun persoalan kerusakan selalu disebut sebagai bencana ekologi, seolah menyingkirkan kapitalisme yang memiliki andil terhadap kerusakan lingkungan tersebut (Mudhoffir 2011b).

Disamping itu juga Mudhoffir dalam tulisan yang berjudul *Governmentality dan Pemberdayaan dalam Advokasi Lingkungan: Kasus Lumpur Lapindo*. Dalam tulisan ini Mudhoffir membahas semburan lumpur di Sidoarjo akibat aktifitas pertambangan melahirkan konflik kepentingan antara aktor-aktor negara, korporasi, masyarakat korban dan aktivis NGO. Meskipun masyarakat korban dengan NGO membentuk kolaborasi memperjuangkan kepentingan, namun dalam tulisan ini disebut terdapat gerakan sosial baru yang disebut gerakan lingkungan yang muncul akibat konflik lingkungan, dalam memperjuangkan tuntutan masyarakat korban. Tuntutan tersebut meliputi penyelesaian ganti rugi, serta pemulihan lingkungan. Memang kehadiran NGO tidak selamanya dapat produktif dalam menciptakan perubahan sosial, namun dapat membantu masyarakat yang *powerless* menjadi seimbang saat berhadapan dengan negara dan korporasi. Namun NGO sendiri memiliki peran ambiguitas, antara membantu masyarakat korban bebas dari masalah dan membentuk wacana hegemonik yang membuat *vulnerable* (Mudhoffir 2011a). Meskipun sama-sama membahas persoalan lingkungan yang terjadi akibat aktifitas akumulasi kapital dari perusahaan. Namun Tulisan Mudhoffir membahas peran NGO yang dipertanyakan, sedangkan tulisan ini mengupas berbagai konflik masyarakat dengan perusahaan.

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah studi literatur. Dimilai dari tahap

mengumpulkan berbagai literatur seperti buku, artikel ilmiah, makalah dan informasi dari berbagai media. Kemudian literatur tersebut dipelajari, dan lebih memfokuskan pada literatur yang memuat isu kerusakan lingkungan, terutama kerusakan akibat aktifitas produksi perusahaan industri, perkebunan dan tambang.

PERSOALAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI

Mengkaji persoalan lingkungan (ekologi) dalam Sosiologi dapat digunakan beberapa pendekatan (Susilo 2009):

1. Marxisme ekologis, yang menyatakan kerusakan lingkungan merupakan dampak perkembangan kapitalisme,
2. Ekologi politik baru, berupaya membongkar relasi kuasa dalam hubungan antar manusia sebagai pola-pengguna pada konteks suatu lingkungan yang dipolitisasi
3. Feminisme lingkungan, yang berupaya membongkar ide-ide dominan maskulin mengenai klasifikasi pengalaman, seraya berupaya menghapus ketimpangan yang diproduksi oleh ide-ide itu,
4. Ilmu pengetahuan dan kekuasaan yang banyak meminjam kerangka hubungan antara klaim pengetahuan dengan kekuasaan.

Karl Marx menjelaskan konflik sebagai pertentangan kepentingan yang terjadi antara *borjuis* dan *proletar* karena kepentingan materialis. Kelas *borjuis* menginginkan laba yang besar dari produksinya, sehingga mempekerjakan buruh dengan waktu kerja yang lama namun menerima upah yang relatif rendah. Sedangkan kelas *proletar* menginginkan upah yang tinggi. Ketegangan hubungan produksi dalam sistem produksi kapitalis antara kedua kelas melahirkan gerakan sosial besar dan radikal, yaitu revolusi (Susan 2010). Gerakan ini muncul karena kaum *proletar* sadar akan penderitaan bersama dan kemelaratan ekonominya dan mereka terpusat pada satu tempat memungkinkan terbentuknya jaringan komunikasi dan menghasilkan kesadaran bersama. Kelas *proletar* ini secara bertahap akan membuat posisi kapitalis sulit. Sekali jaringan komunikasi itu dibentuk dan kepentingan bersama menjadi jelas, maka

dibentuklah organisasi kelas *proletar* melawan musuh bersama. Organisasi ini dapat berupa berdirinya serikat-serikat buruh atau serikat-serikat kerja lain, untuk mendesak upah yang lebih tinggi, perbaikan kondisi kerja dan sebagainya. Akhirnya organisasi kelas buruh itu akan menjadi cukup kuat bagi mereka untuk menghancurkan seluruh struktur sosial kapitalis dan menggantikannya dengan struktur sosial yang akan menghargai kebutuhan dan kepentingan umat manusia seluruhnya (Johnson 1986).

Perspektif Marxis digunakan menganalisis konflik terjadi antara dua kelas. Kelas pemilik modal dan kelas yang tidak memiliki modal. Perusahaan merupakan kelas pemilik modal yang bertentangan kepentingannya dengan masyarakat (bukan pemilik modal). Sebagai pemilik modal, perusahaan menginginkan laba yang besar dari produksi industri, perkebunan dan pertambangan. Masyarakat memiliki kepentingan mempertahankan tanah/lahan mereka, melindungi air sebagai sumber kehidupan (agar tidak tercemar dan kekeringan), melindungi udara agar tidak tercemar dan memenuhi kebutuhan dasar.

Mengkaji konflik dalam sosiologi perlu mengidentifikasi aktor yang terlibat, kepentingan masing-masing pihak serta mengetahui strategi protes untuk memperjuangkan kepentingan. Strategi protes merujuk tulisan Afrizal dalam Sosiologi Konflik Agraria, dimana masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan dilakukan dengan cara (Afrizal 2006):

1. Strategi Organisasi, dalam memperjuangkan kepentingan melawan perusahaan masyarakat yang terlibat konflik membuat organisasi yang ditandai memiliki pimpinan organisasi, mempunyai anggota yang kompak yang memperkuat posisi tawar mereka.
2. Strategi Lobi, masyarakat menggunakan taktik surat-menyurat dan bertemu dengan perusahaan dan pemerintah guna menyampaikan tuntutan mereka
3. Strategi Kekerasan, perjuangan kepentingan juga dilakukan dengan melakukan taktik merusak, dan menghancurkan harta milik perusahaan, serta memblokir aktivitas perusahaan

4. Strategi Demonstrasi, dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan, dimana masyarakat mendemonstrasi perusahaan-perusahaan dan juga pemerintah, pemerintah daerah, serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
5. Strategi Pendudukan Lahan, terjadi pada masyarakat yang lahan mereka dikuasai oleh perusahaan untuk mengklaim hak dengan cara menggarap lahan yang disengketakan.

Strategi tersebut dilakukan oleh masyarakat dalam memperjuangkan kepentingan mereka, agar memiliki posisi yang relatif kuat. Karena dalam konflik lingkungan yang melibatkan masyarakat dengan perusahaan, masyarakat selalu dalam posisi *powerless*.

BERBAGAI KASUS KONFLIK MASYARAKAT DENGAN PERUSAHAAN AKIBAT KERUSAKAN LINGKUNGAN

Konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan akibat pencemaran udara diurai dalam buku bunga rampai berjudul, *Robohnja Sumatera Kami* ditulis oleh Uslaini et.al. Salah satu bagian dari tulisan yang berjudul *Generasi yang Hilang Akibat Pembakaran Hutan dan Lahan*, mengulas pencemaran udara yang terjadi di Riau. Pencemaran udara saat itu di klasifikasikan berada dalam zona hitam, karena kandungan oksigen murni 1%. Pencemaran udara ini telah terjadi dalam kurun waktu ±17 tahun. Hal ini terjadi karena aktifitas produksi perkebunan, seperti perubahan fungsi hutan dan lahan gambut menjadi perkebunan kelapa sawit. Untuk menjadikan lahan tersebut subur dilakukan upaya membakar sisa potongan kayu, sebelum ditanami kelapa sawit. Cara ini dipilih karena lebih murah, dibandingkan pengolahan lahan tanpa dibakar (Uslaini et al. 2015). Asap pembakaran tersebut yang mencemari udara, dan dihirup oleh berbagai lapisan masyarakat.

Konflik disini terjadi antara masyarakat yang terpapar kabut asap dengan perusahaan perkebunan. Masyarakat memiliki kepentingan aktifitas dalam kehidupan tidak terganggu oleh asap. Namun perusahaan memiliki kepentingan mendapatkan keuntungan, dari menekan biaya produksi dalam proses pembukaan

lahan. Saat kepentingan saling bertentangan, inilah yang disebut konflik. Kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi baik, mereka memiliki alternatif menghindari pencemaran udara, seperti melakukan mobilitas geografis ke tempat yang lebih aman. Namun sudah pasti membukuhkan biaya relatif besar dan mengurangi waktu produktif bekerja. Namun bagi masyarakat yang tidak memiliki kesanggupan, mereka akan tetap bertahan didaerah yang tercemar asap. Masyarakat berada dalam posisi *powerless* menyuarakan aspirasi. Dan seolah tidak ada jalan, selain harus menunggu upaya meredakan pencemaran udara yang dilakukan pemerintah, seperti dengan mengupayakan hujan buatan. Hal tersebut hanyalah upaya menanggulangi kabut asap, bukanlah upaya preventif. Dan disini juga belum muncul strategi yang dilakukan masyarakat agar kepentingan mereka mendapat hak menghirup udara bersih, dapat terpenuhi.

Konflik masyarakat dengan perusahaan, karena kegiatan tambang ditulis oleh Regus yang berjudul *Tambang dan Perlawanan Rakyat; Studi Kasus Tambang di Manggarai NTT*. Tulisan ini membahas kegiatan eksploitasi dan eksplorasi perusahaan tambang PT SJA dan PT ABM di Manggarai, yang dalam aktifitas mendapat "perlindungan" dari pemerintah. Aktifitas tambang tersebut mengakibatkan kerusakan permanen pada lingkungan, seperti kerusakan tanah, ekosistem hutan rusak, pencemaran air, hilangnya sumber mata air, rusaknya ekosistem laut di sekitar lokasi tambang. Tentu saja kondisi ini mendapat perlawanan dari masyarakat (Regus 2011). Tulisan tersebut mengulas alasan masyarakat lokal melakukan sesistensi. Namun membahas upaya yang dilakukan masyarakat lokal Manggarai memperjuangkan hak mereka, memperoleh lingkungan yang tidak tercemar belum dibahas.

Konflik akibat kegiatan perusahaan tambang juga dibahas dalam tulisan *Tanah yang Telah Hilang dan Tanah yang Harus Dipertahankan*. Tulisan ini membahas tentang aktifitas tambang batu bara di Bengkulu. Terdapat 6 Perusahaan tambang di hulu sungai Bengkulu berdasarkan hasil penelitian Walhi Bengkulu. Dalam melaksanakan aktifitas tambang, perusahaan

tersebut membutuhkan lahan. Dan lahan yang diperoleh perusahaan diantaranya merupakan lahan yang telah diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang dipindahkan dari Jawa Tengah, akibat pembangunan waduk Gajah Mungkur (Uslaini et al. 2015). Masyarakat terganggu dari tanah yang sudah negara berikan untuk mereka, karena aktifitas pertambangan. Tidak cukup disitu saja, kegiatan pertambangan juga merusak lingkungan, seperti tercemarnya sungai.

Perlawanan masyarakat melawan perusahaan juga terjadi di Nagari Tuik IV Koto Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan. Konflik terjadi antara masyarakat menolak perusahaan tambang dengan pihak perusahaan PT. Barito Karya Denai. Masyarakat yang menolak aktifitas tambang tersebut karena, kegiatan tambang perusahaan menimbulkan tercemar aliran sungai, lubang tambang diyakini menghasilkan gas metana, sungai menjadi kering karena daerah resapan berkurang. Disamping itu meskipun perusahaan menjanjikan akan diserap tenaga kerja, namun tidak ada jaminan masyarakat lokal, akan diperkerjakan pada perusahaan tersebut (Uslaini et al. 2015).

Konflik masyarakat dengan perusahaan karena dugaan terjadi pencemaran aliran sungai yang berdampak pada penurunan produktifitas pertanian, diulas dalam tulisan Perjuangan Hak Ekologis Komunitas Petani. Konflik terjadi antara komunitas petani kelurahan Kampung Jua Nan XX dengan PT. Semen Padang. Komunitas petani yang menggunakan air sungai sebagai sumber irigasi, meyakini air tersebut tercemar limbah galian C dan masuk ke lahan pertanian. Namun dugaan pencemaran tersebut ditolak oleh PT. Semen Padang. Masing-masing pihak memiliki pertentangan kepentingan. Petani menginginkan ganti rugi atas penurunan produktifitas pertanian. Sebaliknya PT. Semen Padang menginginkan aktifitas produksi terus berlanjut agar memperoleh keuntungan, tanpa ada kendala dan tuntutan dari berbagai pihak. Komunitas petani melakukan berbagai strategi mulai dari lobi, dengan menyurati pihak PT. Semen Padang agar dapat berdiskusi guna menyalurkan aspirasi komunitas petani. Tidak berhasil dengan strategi tersebut masyarakat memilih strategi organisasi

dengan membentuk kelompok terorganisir dengan tujuan aspirasi atau kepentingan mereka terpenuhi. Namun hal ini masih belum berhasil, dan menghasilkan kesepatan menunjuk tim independen untuk meneliti dugaan pencemaran lahan pertanian (Anggreta 2012).

Tim independen yang terdiri dari para ahli, melakukan kajian terhadap dugaan terjadi pencemaran lahan pertanian oleh limbah galian C PT. Semen Padang. Dari hasil diskusi dengan tim independen, tim sudah melakukan penelitian tahun 2011-2012. Dilakukan penelitian terhadap tanah, air, kondisi sosial ekonomi masyarakat petani. Hasil penelitian tersebut mencapai kesimpulan, tidak ditemukan pencemaran pada lahan pertanian masyarakat. Menelaah dugaan pencemaran sudah terjadi sangat lama yaitu dari tahun 1985 dan sudah terjadi penurunan jumlah limbah galian C dirasakan masyarakat pada tahun 2010, wajar sulit sekali dibuktikan terjadi pencemaran. Dalam kajian sosiologi sah saja jika masyarakat tetap memperjuangkan kepentingan mereka, bahkan setelah hasil penelitian dari tim independen diumumkan, karena inilah wujud perjuangan kepentingan oleh masyarakat. Perjuangan kepentingan akan terhenti saat kepentingan telah terpenuhi atau spirit memperjuangkan kepentingan sudah pudar.

Uraian konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan diatas, mempertegas bahwa saat berhadapan dengan perusahaan, masyarakat berada dalam posisi *powerless*. Bahkan tidak jarang menimbulkan kebingungan, tentang upaya yang harus dilakukan. Beberapa kasus pemerintah terkesan berpihak kepada perusahaan, seperti dalam kasus pencemaran udara di Riau, kasus tambang di Manggarai dan Bengkulu. Pihak yang cenderung menjadi mitra masyarakat adalah NGO yang konsen pada isu lingkungan. Meskipun yang menjadi tuntutan aspirasi masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi, paling tidak masyarakat

KESIMPULAN

Persoalan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktifitas produksi perusahaan industri, perkebunan dan pertambangan memang memposisikan masyarakat pada kondisi *powerless*. Namun tetap saja perlu

pihak yang menjadi mitra agar masyarakat mempunyai kekuatan berhadapan dengan perusahaan. Pihak perusahaan sendiri bukanlah pihak “tak tersentuh”, jika tidak didukung oleh negara (pemerintah). Idealnya pemerintah berada dalam posisi netral atau tidak berpihak pada kaum kapitalis, agar persoalan kerusakan dapat segera diatasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2006. *Sosiologi Konflik Agraria; Protes-Protes Agraria Dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer*. Padang: Andalas University Press.
- Anggreta, Dian Kurnia. 2012. “Perjuangan Hak Ekonomis Komunitas Petani.” *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan* 1(1):51-59.
- Darsono, Febryandi. 2011. “Koalisi Ornop Pasca Orde Baru: Studi Tentang Jaringan Walhi Dalam Kampanye Isu Hutan.” *Masyarakat Jurnal Sosiologi* 16(1):27-48.
- Johnson, Doyle Paul. 1986. *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*. Jakarta: PT Gramedia.
- Mantra, Ida Bagoes. 2000. *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mudhoffir, Abdil Mughis. 2011a. “Governmentality Dan Pemberdayaan Dalam Advokasi Lingkungan: Kasus Lumpur Lapindo.” *Masyarakat Jurnal Sosiologi* 16(1):49-75.
- Mudhoffir, Abdil Mughis. 2011b. “Krisis Ekologi Dan Ancaman Bagi Kapitalisme.” *Masyarakat Jurnal Sosiologi* 16(1):93-102.
- Pruitt, G. Dean and Rubin Z. Jeffrey. 2004. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Regus, Maximus. 2011. “Tambang Dan Perlawanan Rakyat: Studi Kasus Tambang Di Manggarai NTT.” *Masyarakat Jurnal Sosiologi* 16(1):1-26.
- Ritzer, George and J. Goodman Douglas. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Edisi keen. Jakarta: Kencana.
- Sastri, Ridha Yola, Hasdi Aimon, and Efrizal Syofyan. 2013. “Analisis Serta Perencanaan Pertumbuhan Ekonomi Dan Invertasi Di Sumatera Barat.” *Jurnal Kajian Ekonomi* 2(3):21-43.
- Susan, Novri. 2010. *Pengantar Sosiologi Konflik Dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Susilo, Rachmad K. Dwi. 2009. *Sosiologi Lingkungan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Uslaini et al. 2015. *Robohnja Sumatera Kami; Tutur Lirih Warga Krisis Kehidupan Di Sekujur Pulau Sumatera*. Bogor: Samdhana Institute.



Penerbit:

Laboratorium Program Studi Pendidikan Sosiologi, STKIP PGRI Sumbar
Kampus STKIP PGRI, Jl. Gunung Pangilun, Padang, Sumatera Barat
Email: redaksimamangan@yahoo.com

ISSN 2301-8496



9 772301 849613